

---

## **Menelisis Problematika Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur**

**Nindita Fadhila<sup>1</sup>, Lilia Pasca Riani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Universitas Negeri Yogyakarta*

e-mail: <sup>1\*</sup>[ninditafadhila.2021@student.uny.ac.id](mailto:ninditafadhila.2021@student.uny.ac.id), <sup>2\*</sup>[lilia.pasca.riani@uny.ac.id](mailto:lilia.pasca.riani@uny.ac.id)

### **Abstrak**

Pendidikan merupakan komponen vital dalam membentuk generasi penerus bangsa dan memajukan kualitas sumber daya manusia. Meskipun akses pendidikan adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, realitas di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam kualitas dan akses pendidikan, terutama terkait biaya yang terus meningkat setiap tahun. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang tinggi menjadi penghalang utama bagi banyak siswa, baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Faktor-faktor seperti ketidakefektifan anggaran sekolah, kurangnya transparansi, minimnya pengawasan pemerintah, dan rendahnya kesejahteraan guru turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dana pendidikan yang lebih baik, transparan dan akuntabel untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

**Kata kunci:** *Pendidikan, pembiayaan, kesenjangan, akses, kualitas n, transparansi, pengelolaan dana, kesejahteraan guru.*

### **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan aspek krusial dalam membentuk generasi penerus bangsa. Namun, akses pendidikan yang ideal masih belum tercapai, meskipun sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa" (Arsal & Hidayat, 2024; Papilaya, 2022). Oleh karena itu, negara harus memastikan seluruh warga negara Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan dianggap sebagai elemen penting dalam pembangunan, dan bangsa Indonesia yang kini memasuki abad ke-21 menghadapi berbagai tantangan dalam dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. Saat ini, pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tekanan dan masalah, termasuk peningkatan biaya sekolah.

Diskusi publik saat ini banyak berfokus pada tingginya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Mahasiswa, yang kerap mewakili suara masyarakat kurang mampu, sering memprotes kenaikan biaya ini. Menteri Pendidikan Indonesia menanggapi bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib, namun tanggapan ini menuai banyak kritik dari masyarakat. Berdasarkan data dari BPS yang dikutip oleh detikedu, biaya pendidikan meningkat 10% hingga 15% setiap tahun. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, karena tingginya biaya pendidikan dapat meningkatkan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan (Fatmariyanti et al., 2023; Hasibuan et al., 2021).

Masalah biaya pendidikan tidak hanya terjadi di perguruan tinggi tetapi juga di tingkat dasar. Meskipun pemerintah memberikan dana BOS untuk SD dan SMP negeri, banyak keluarga dari kelas menengah ke bawah merasa dana tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai dengan peraturan pemerintah. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan mendukung keberhasilan proses belajar mengajar (Madjid et al., 2021; Mulya, 2019). Banyak sekolah belum memanfaatkan dana dengan maksimal, baik secara efektif maupun efisien. Pemerintah daerah, yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas, berupaya mengatasi masalah pembiayaan melalui perencanaan program dan pengelolaan anggaran yang baik. Pengelolaan keuangan pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mengurangi tekanan biaya bagi siswa dan orang tua.

Pembiayaan pendidikan meliputi investasi dana untuk mendukung proses belajar mengajar. Pengelolaan keuangan pendidikan sangat penting untuk memastikan dana digunakan secara optimal dan efektif, meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap penggunaan dana, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana pendidikan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam konteks pembiayaan pendidikan di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain studi literatur untuk menganalisis secara teoritis hasil penelitian sebelumnya mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi dan memahami konsep, teori, dan praktik yang telah dikembangkan oleh peneliti lain. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan observasi (Fatirul & Walujo, 2022; Hamzah, 2020). Data yang dikumpulkan diperoleh dari website, jurnal ilmiah online, berita media masa, yang meliputi konteks kesenjangan kualitas dan biaya, kurangnya pendanaan pemerintah, persaingan, komersialisasi pendidikan, serta gaya hidup dan tuntutan sosial. Data dianalisis melalui tiga metode: penyajian data, kompilasi/reduksi data, dan pembahasan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **HASIL**

#### **Kesenjangan Kualitas Dan Biaya Pendidikan**

Banyak sekolah dan universitas swasta menawarkan fasilitas dan program "premium" dengan biaya tinggi, tetapi kualitas pendidikan yang ditawarkan tidak selalu

sebanding. Akibatnya, akses pendidikan menjadi tidak merata, di mana masyarakat berpenghasilan tinggi lebih mudah mendapatkan pendidikan berkualitas dibandingkan mereka yang kurang mampu (Sinta & Iqbal, 2023). Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan menjelang tahun 2045, ketika diprediksi akan ada lonjakan penduduk usia produktif yang disebut generasi emas. Tanpa perbaikan, harapan terhadap generasi emas ini bisa menjadi sekadar angan-angan.

Pendidikan berkualitas perlu didukung oleh sarana memadai dan dana yang cukup, tetapi seringkali ini hanya tersedia di sekolah negeri di kota besar, menciptakan kesenjangan pendidikan. Pendidikan di daerah terpencil sangat tertinggal dibandingkan kota besar karena sulitnya akses dan kurangnya fasilitas. Pemerintah harus fokus pada solusi untuk memastikan semua sekolah, termasuk yang di pelosok, memiliki fasilitas yang memadai. Kepala sekolah berperan penting dalam mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar yang efektif (Purwanto, 2021).

Kesenjangan sosial dalam akses pendidikan sangat terlihat di daerah terpencil, di mana anggaran pendidikan belum optimal. Infrastruktur sekolah dan akses jalan di daerah pelosok perlu diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan belajar. Faktor-faktor seperti rendahnya kualitas sarana, infrastruktur, dan tenaga pengajar menyebabkan kesenjangan ini. Pemerintah harus cepat bertindak untuk mengatasi ketimpangan ini demi menciptakan generasi yang berkualitas (Fitri & Jamilus, 2023; Lumowa et al., 2021).

### **Kurangnya Pendanaan Pendidikan Dari Pemerintah**

Banyak pihak menilai rendahnya anggaran pendidikan yang disetujui DPR dibandingkan dengan yang diwajibkan konstitusi sebagai tanda kurangnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan. Padahal, kemajuan pendidikan nasional memerlukan biaya besar untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan kesejahteraan guru. Kebijakan ini dianggap mencerminkan kepentingan elit pemerintah saja. Pengelolaan dana pendidikan, seperti dana BOS, sering menghadapi masalah karena kurangnya tenaga administrasi berkompeten. Akibatnya, pengelolaan dana sering dilakukan oleh guru yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan perpajakan yang memadai. Ini menyebabkan masalah transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana, serta keterlambatan penyusunan RAPBS yang berdampak pada pencairan dana BOS. Perselisihan antara guru dan pengelola dana BOS juga muncul karena dianggap tidak transparan, mengakibatkan potensi penyelewengan dana (Mulya, 2019).

Selain itu, masalah pengelolaan dana BOS timbul karena penggunaan yang tidak tepat dan keterlambatan pencairan, yang berdampak pada pelaksanaan program sekolah. Sekolah di daerah terpencil dan pedesaan juga mengalami kesulitan dana, memaksa mereka tetap beroperasi meski kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik berkualitas. Pemerintah kurang survei terhadap sekolah-sekolah di pelosok, menyebabkan kendala serius.

Banyak sekolah mengandalkan tenaga pendidik sukarela tanpa gaji pokok dan tunjangan. Pembiayaan pendidikan yang terbatas berdampak pada capaian pendidikan. Sekolah yang tidak dapat mengelola dana dengan baik akan menghadapi berbagai masalah, termasuk kesenjangan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan antar sekolah. Transparansi pembiayaan dan kompetensi pengelola juga menjadi masalah, berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dana dan manipulasi anggaran. Kompetensi

pengelola dalam mengelola pembiayaan pendidikan sangat penting untuk mencegah masalah yang menghambat penyelenggaraan pendidikan. Tanpa pengelolaan yang baik, penyelenggaraan pendidikan akan terganggu, menyebabkan ketimpangan kualitas antar sekolah dan penyalahgunaan dana (Sofyan et al., 2021).

### **Persaingan dan Komersialisasi Pendidikan**

Persaingan antar sekolah dan universitas untuk menarik siswa terbaik dan menjadi institusi unggulan telah menyebabkan peningkatan biaya pendidikan. Hal ini menciptakan budaya komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan dipandang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, bukan sebagai hak dasar manusia. Komersialisasi pendidikan dianggap tercela karena mengorbankan nilai-nilai etika, budaya, dan agama. Dalam konteks ideologi neoliberalisme dan kapitalisme, pendidikan yang berkualitas tinggi dihasilkan dari output yang dapat dijual, seperti penelitian ilmiah, sehingga biaya pendidikan menjadi mahal. Fenomena ini juga dapat menimbulkan diskriminasi pendidikan dan pelanggaran etika (Rustiawan, 2015; Sarvitri & Sunandar, 2020).

### **Gaya Hidup Dan Tuntutan Sosial Pendidikan**

Remaja mengalami proses pembentukan perilaku di mana mereka mencari identitas diri dan berusaha mencapai pola ideal. Remaja cenderung terlibat dalam pertemanan sebaya sebagai kelompok sosial dalam pencarian identitas, sesuai dengan batasan usia remaja di Indonesia yaitu 11-24 tahun. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di universitas dan telah memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa. Mahasiswa, seperti masyarakat umum, memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti alat tulis, buku kuliah, transportasi, dan alat penunjang lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini penting untuk mencapai kehidupan yang selaras dengan lingkungan. Biasanya, mahasiswa akan melakukan kegiatan konsumtif (Wahidah et al., 2014).

Membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tidak menjadi masalah selama itu benar-benar diperlukan, seperti membeli handphone untuk komunikasi dan menyelesaikan tugas. Namun, masalah muncul ketika perilaku konsumtif berkembang, seperti membeli handphone mengikuti tren dan memiliki lebih dari dua handphone. Sebaiknya, mahasiswa memanfaatkan uang untuk kebutuhan yang lebih penting seperti buku kuliah dan bahan referensi. Modernisasi membawa perubahan sosial di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan kesenian. Modernisasi mencakup perkembangan sosial berdasarkan industrialisasi, kemajuan teknologi, urbanisasi, dan infrastruktur. Era modernisasi meningkatkan keragaman kebutuhan manusia, sehingga produsen berlomba-lomba menawarkan produk dan jasa baru yang menarik dan berkualitas. Keinginan membeli sesuatu sering muncul dari iklan, mengikuti tren teman, atau gengsi (Fisher & Tallant, 2020; Haynes, 2018).

Gaya hidup berbeda dengan cara hidup. Cara hidup mencakup norma, ritual, dan pola sosial, sedangkan gaya hidup diekspresikan melalui apa yang dikenakan, dikonsumsi, dan perilaku di hadapan orang lain. Mahasiswa diharapkan mengisi waktu dengan belajar dan kegiatan positif, memiliki orientasi masa depan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Namun, pengamatan menunjukkan bahwa kampus sering dijadikan ajang pamer penampilan dan gaya hidup. Banyak mahasiswa menerapkan gaya hidup konsumtif, yang membuat kehidupan kampus semakin tidak jelas. Mahasiswa yang mampu secara finansial mudah terpengaruh untuk memenuhi gaya hidup konsumtif

ini, di mana mereka dianggap mengikuti perkembangan zaman jika memakai barang bermerk terkenal, bukan berdasarkan prestasi. Mahasiswa dari ekonomi menengah juga terpengaruh oleh tuntutan pergaulan untuk mengikuti gaya hidup konsumtif. Sebagian mahasiswa kini lebih mementingkan gengsi dan penampilan dibanding kebutuhan kampus yang penting untuk kuliah. Sebagai pelaku ekonomi, mahasiswa sebaiknya mengutamakan kebutuhan prioritas daripada eksistensi di lingkungan perkuliahan (Pendidikan et al., 2018; Wahidah et al., 2014).

## **PEMBAHASAN**

### **Biaya Pendidikan yang Tinggi**

Pendidikan merupakan elemen penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM), sebagaimana dijelaskan oleh Fitri (2023). Hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan yang setara ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945. Namun, tantangan akses terhadap pendidikan yang layak masih ada, terutama karena biaya pendidikan yang tinggi. Ini menyebabkan perlunya amandemen UUD 1945 untuk memasukkan klausul tentang pendidikan. UUSPN Nomor 20/2003 menetapkan alokasi 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan, demi mewujudkan visi Kemendikbud dalam menyediakan pendidikan yang relevan, berkualitas, merata, dan berkelanjutan (Hastina et al., 2020; Sudarmono et al., 2020).

Meskipun aturan tersebut menjamin alokasi dana yang sesuai untuk pengelolaan pendidikan, keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah mengakibatkan alokasi tersebut dilakukan secara bertahap dengan komitmen peningkatan tiap tahunnya. Harapannya adalah peningkatan mutu pendidikan akan berimbas pada peningkatan kualitas SDM. Namun, prioritas pembiayaan seharusnya lebih difokuskan pada mengatasi masalah aksesibilitas dan kapasitas. Oleh karena itu, terdapat kriteria yang harus dipenuhi sebelum alokasi anggaran untuk pendidikan dilakukan. Biaya yang ditanggung oleh pihak terkait mencakup kemampuan dan keterampilan yang diperoleh melalui berbagai cara seperti pendidikan formal, pembelajaran mandiri, atau pembelajaran sambil bekerja. Dengan memperoleh kemampuan dan keterampilan tersebut, diharapkan akan terjadi pengembalian investasi yang tinggi dalam bentuk pendapatan. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa investasi dalam pendidikan berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan, sesuai dengan paradigma modal manusia (Rustiawan, 2015; Ulandari et al., 2022).

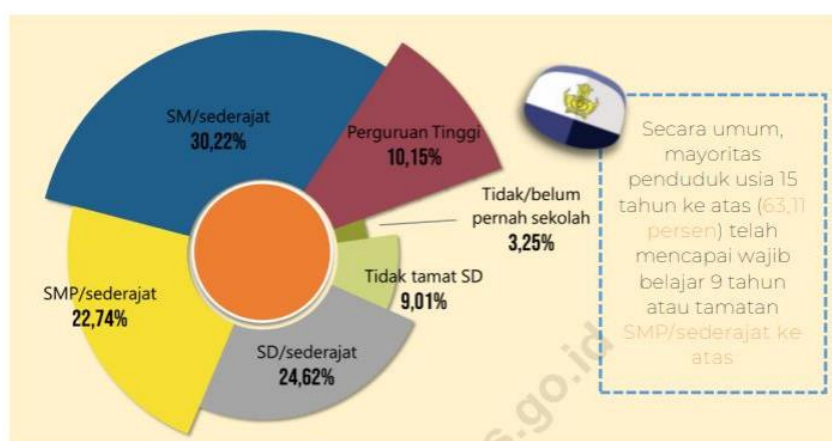
Manajemen biaya yang efisien dan pemenuhan kebutuhan dana menjadi hal krusial dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan elemen administratif dasar dalam hal pembiayaan. Untuk mencapainya, alokasi anggaran harus dilakukan secara terencana dan melibatkan semua pihak yang terkait. Selain itu, dibutuhkan pembangunan kepercayaan, baik di antara pemerintah dan masyarakat maupun di dalam masyarakat itu sendiri. Untuk menjamin kesuksesan pendanaan pendidikan, keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sangat penting mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan (Bili, 2017; Sianturi et al., 2020).

Pembiayaan pendidikan terbagi menjadi tiga jenis biaya, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya operasional satuan pendidikan. Biaya investasi pada lembaga pendidikan mencakup penyediaan fasilitas, pengembangan sumber daya

manusia, dan aset tetap. Penting juga mempertimbangkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh siswa agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara terus-menerus. Biaya operasional satuan pendidikan mencakup gaji dan tunjangan staf, serta berbagai biaya langsung seperti air, telekomunikasi, pemeliharaan fasilitas, transportasi, makanan, pajak, asuransi, dan lain-lain (Asiah, 2023; Niedlich et al., 2021; Wu & Shi, 2020).

### Anggaran untuk Pendidikan

Sejak abad ke-19 dan 20, perkembangan teknologi telah mendorong transformasi dari sistem pertanian ke sistem manufaktur. Perubahan ini juga mempengaruhi orientasi pikiran dari spiritualisme menjadi positivisme dan materialisme. Tujuan utama industrialisasi adalah meningkatkan produksi barang konsumsi secara efisien. Selain itu, perkembangan sistem politik juga sangat dipengaruhi oleh proses industrialisasi. Sayangnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa berhenti sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA karena keterbatasan finansial, yang menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bukan karena kurangnya kemampuan akademik (Arsal & Hidayat, 2024; Hasibuan et al., 2021; Sofyan et al., 2021).



**Gambar 1**  
**Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas, 2023**

Pada tahun 2023, hanya 10,15% dari populasi usia 15 tahun ke atas yang diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mayoritas dari mereka akan menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA atau setara, menurut data statistik (BPS, 2023). Tanggung jawab biaya pendidikan, yang mencakup biaya langsung dan tidak langsung, seharusnya dibagi antara pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari komunitas sekolah. Namun, dalam kenyataannya, siswa sering kali harus menanggung sebagian besar biaya ini, yang pada akhirnya membuat biaya pendidikan menjadi lebih tinggi.

### Faktor Penyebab Naiknya Biaya Pendidikan

---

Biaya pendidikan naik karena berbagai alasan, berikut adalah penjelasannya merujuk pada hasil penelitian dari Arsal & Hidayat, (2024); Hasibuan et al., (2021); dan Sabrina & Effane, (2022).

1. Anggaran sekolah yang tidak efisien dan tidak efektif mengacu pada beberapa hal:
  - a. Perencanaan Keuangan yang Buruk:

Sekolah seringkali tidak memiliki rencana keuangan yang matang dan terperinci, sehingga pengeluaran tidak sesuai dengan prioritas atau kebutuhan utama. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) mungkin tidak dibuat atau dievaluasi dengan baik, menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat.
  - b. Pengelolaan Dana yang Tidak Optimal:

Dana yang diterima dari berbagai sumber, seperti bantuan pemerintah, dana masyarakat, dan sumber lainnya, mungkin tidak dikelola dengan baik. Ada kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak perlu atau pemborosan, yang mengurangi efisiensi penggunaan dana.
  - c. Minimnya Sumber Pendapatan Alternatif:

Sekolah mungkin terlalu bergantung pada dana dari pemerintah atau sumbangan masyarakat tanpa mencari sumber pendapatan alternatif seperti hibah atau usaha sekolah. Ketergantungan ini membuat anggaran mudah terganggu jika ada pengurangan dana dari sumber utama.

Secara keseluruhan, anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif menyebabkan dana yang ada tidak digunakan secara optimal, menambah beban biaya pendidikan dan mengurangi aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi siswa.

2. Kurangnya demokrasi dan transparansi dalam manajemen sekolah merujuk pada beberapa masalah berikut:
  - a. Partisipasi Masyarakat yang Terbatas:

Manajemen sekolah yang kurang demokratis berarti keputusan-keputusan penting terkait pengelolaan dana dan kebijakan sekolah dibuat oleh segelintir orang tanpa melibatkan para pemangku kepentingan, seperti orang tua, guru, dan masyarakat. Kurangnya partisipasi ini menyebabkan kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar sekolah.
  - b. Kurangnya Keterbukaan dalam Pengelolaan Dana:

Transparansi yang rendah berarti tidak ada keterbukaan mengenai bagaimana dana sekolah dikelola dan dialokasikan. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat serta membuka peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan dana.
  - c. Pengawasan yang Lemah:

Ketidakdemokratisan dan kurangnya transparansi sering disertai dengan kurangnya pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Tanpa pengawasan yang ketat, penyalahgunaan anggaran atau pengeluaran yang tidak efisien dapat terjadi, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pendidikan.

Secara keseluruhan, kurangnya demokrasi dan transparansi dalam manajemen sekolah mengarah pada pengelolaan yang tidak efisien dan tidak efektif, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan dana. Hal ini menyebabkan biaya pendidikan

menjadi lebih tinggi dan membatasi akses bagi siswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

3. Rendahnya kesejahteraan guru

Merujuk pada kondisi di mana guru tidak menerima gaji dan tunjangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini dapat mempengaruhi biaya pendidikan melalui beberapa mekanisme berikut:

a. Tambahan Beban Biaya pada Siswa:

Ketika gaji guru tidak mencukupi, sekolah mungkin mengenakan biaya tambahan pada siswa untuk menutupi kekurangan tersebut. Ini bisa berupa biaya ekstra untuk "les tambahan," uang komite, atau kontribusi lainnya yang dibebankan kepada orang tua siswa.

b. Pengurangan Kualitas Pengajaran:

Guru yang tidak sejahtera mungkin harus mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ini dapat mengurangi waktu dan energi yang mereka investasikan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengajaran, sehingga kualitas pendidikan menurun. Ketika kualitas pengajaran menurun, orang tua mungkin merasa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk les privat atau bimbingan belajar agar anak-anak mereka tetap dapat bersaing akademis.

c. Kesulitan dalam Rekrutmen dan Retensi Guru Berkualitas:

Gaji yang rendah dan tunjangan yang tidak memadai membuat profesi guru kurang menarik bagi calon tenaga pendidik yang berkualitas. Hal ini mengakibatkan kekurangan guru yang kompeten. Sekolah mungkin harus menawarkan insentif tambahan untuk menarik guru yang berkualitas, yang bisa menyebabkan kenaikan biaya operasional sekolah.

Secara keseluruhan, rendahnya kesejahteraan guru berkontribusi pada peningkatan biaya pendidikan karena berbagai mekanisme yang menambah beban finansial baik pada sekolah maupun pada orang tua siswa. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan guru menerima gaji dan tunjangan yang layak, sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada tugas pengajaran tanpa perlu mencari penghasilan tambahan dari sumber lain.

## **Kesimpulan**

Pendidikan adalah aspek vital dalam pembangunan bangsa, tetapi akses terhadap pendidikan yang ideal di Indonesia masih belum tercapai. Biaya pendidikan yang tinggi, baik di tingkat dasar maupun tinggi, menjadi hambatan utama, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Mahalnya biaya pendidikan memicu protes dari mahasiswa dan masyarakat, yang menilai respons pemerintah kurang memadai.

Kesenjangan kualitas dan biaya pendidikan sangat terlihat, dengan sekolah di daerah terpencil tertinggal dalam fasilitas dan akses dibandingkan dengan kota besar. Selain itu, pendanaan pendidikan dari pemerintah masih dinilai rendah dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Pengelolaan dana yang kurang efektif dan efisien juga memperparah masalah ini, dengan banyak sekolah yang belum memanfaatkan dana secara optimal.

Persaingan antar lembaga pendidikan dan komersialisasi pendidikan turut meningkatkan biaya pendidikan, menjadikannya komoditas yang mahal dan tidak



terjangkau oleh semua kalangan. Selain itu, gaya hidup konsumtif dan tuntutan sosial di kalangan mahasiswa menambah beban biaya yang harus ditanggung. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya manajemen pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta peningkatan dana pendidikan yang tepat sasaran. Pemerintah harus memastikan seluruh warga negara mendapatkan akses pendidikan yang layak, sesuai dengan amanat UUD 1945.

### Daftar Pustaka

- Arsal, F. R., & Hidayat, A. (2024). Masalah Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Kenaikan Biaya Pendidikan. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.51178/INVENTION.V5I1.1648>
- Asiah, D. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(1), 68–75. <https://doi.org/10.59996/JURNALPELITANUSANTARA.V1I1.113>
- Bili, K. D. (2017). PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI MASA DEPAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*, 1(2), 159–166. <https://doi.org/10.53395/JES.V1I2.30>
- BPS. (2023). Statistik Pendidikan 2023. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 12). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32f187f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html>
- Fatirul, A. N., & Walujo, D. A. (2022). *METODE PENELITIAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBELAJARAN (Edisi Khusus Mahasiswa Pendidikan dan Pendidik)*. Pascal Books. <https://books.google.co.id/books?id=Il1pEAAAQBAJETODE>
- Fatmariyanti, Y., Zohriah, A., & Bachtiar, M. (2023). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN: KONSEP, LANDASAN HUKUM, DAN MODEL. In *INDOPEDIA (Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan)* (Vol. 1, Issue 2, pp. 443–451). <https://indopediajurnal.my.id/index.php/jurnal/article/view/51>
- Fisher, A., & Tallant, J. (2020). Trust in education. *Educational Philosophy and Theory*, 52(7), 780–790. <https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1692304>
- Fitri, Iyda, & Jamilus. (2023). Transformasi Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Kinerja. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 468–479. <https://doi.org/10.58401/DIRASAH.V6I2.946>
- Hamzah, A. (2020). *METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN (Research & Development) Uji Produk Kuantitatif... - Google Books*. Literasi Nusantara Abadi. [https://www.google.co.id/books/edition/METODE\\_PENELITIAN\\_PENGEMBANGAN\\_Research/67hVEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+pengembangan&pg=PR5&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_PENGEMBANGAN_Research/67hVEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+pengembangan&pg=PR5&printsec=frontcover)
- Hasibuan, L., Us, K. A., & Pendi, H. Z. (2021). Pengelolaan Biaya Pendidikan: Kajian Studi Pustaka. *Jurnal Literasiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.47783/LITERASIOLOGI.V5I2.213>

- Hastina, H., Safiltri, D. A., Ramadhan, R., & Andika, A. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERKAIT AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. *JURNAL MAPPESONA*, 3(2). <https://doi.org/10.30863/MAPPESONA.V3I2.873>
- Haynes, B. (2018). Trust and schooling. *Educational Philosophy and Theory*, 50(2), 119–122. <https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1237346>
- Lumowa, F., Nayoan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36258>
- Madjid, U., Nurrahman, A., Wahyuni, N., Pemerintah, I., Negeri, D., Provinsi, P., & Barat, J. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT PENDIDIKAN DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 65–84. <https://doi.org/10.33701/JIWP.V11I1.1989>
- Mulya, C. (2019). Implementasi Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 3(2), 149–154. <https://doi.org/10.4321/IJEMAR.V3I2.4367>
- Niedlich, S., Kallfaß, A., Pohle, S., & Bormann, I. (2021). A comprehensive view of trust in education: Conclusions from a systematic literature review. *Review of Education*, 9(1), 124–158. <https://doi.org/10.1002/REV3.3239>
- Papilaya, J. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Introduction. In *Shautut Tarbiyah* (Vol. 28, Issue November). CV. Azka Pustaka. <http://journal.arpenta.org/index.php/pesantren/article/view/4>
- Pendidikan, P., Keluarga, E., Hidup, G., Individu, M., Ekonomi, D. L., Konsumtif, P., Risnawati, S., Sri, U., Mintarti, W., Wardoyo, C., & Artikel, R. (2018). Pengaruh Pendidikan Ekonomi Keluarga, Gaya Hidup, Modernitas Individu, dan Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Konsumtif Siswa. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(4), 430–436. <https://doi.org/10.17977/JPTPP.V3I4.10732>
- Purwanto, R. (2021). Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Terhadap Mutu dan Kualitas Sekolah di SD Negeri Soko. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 1(4), 151–160. <https://doi.org/10.52436/1.JPTI.26>
- Rustiawan, H. (2015). KOMERSIALISASI PENDIDIKAN: Analisis Pembiayaan Pendidikan. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(01), 44–63. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/208>
- Sabrina, N., & Effane, A. (2022). Desentralisasi Manajemen Pembiayaan Dan Konflik Dalam Mahalnya Biaya Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 1(1), 84–89. <https://doi.org/10.30997/KARIMAHTAUHID.V1I1.7715>
- Sarvitri, A., & Sunandar, A. (2020). OTONOMI PENDIDIKAN TINGGI DAN PEMBIAYAANNYA: ANTAR KEMAJUAN DAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN (Tinjauan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). *JUDIKA (JURNAL PENDIDIKAN UNSIKA)*, 8(1), 21–36. <https://doi.org/10.35706/JUDIKA.V8I1.1935>
- Sianturi, E., Sihotang, D. O., Nadeak, R., & Siahaan, T. M. (2020). *Bunga Rampai Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Zifatama Jawa.

- 
- Sinta, T. Della, & Iqbal, M. (2023). Kesenjangan Sosial Dalam Mengakses Pendidikan Di Bengkulu. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.37216/TARBAWI.V8I1.847>
- Sofyan, Y., . M., & Barlian, U. C. (2021). ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Sekolah Menengah Umum). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 221–239. <https://doi.org/10.31955/MEA.V5I1.791>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/JMPIS.V2I1.448>
- Ulandari, L. U., Ridha, A. R., Rozalita, D. R., Ananda, R. A., & Witarsa, R. W. (2022). Analisis Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 6(3), 584–590. <https://doi.org/10.26858/JKP.V6I3.35114>
- Wahidah, N., . H., & . A. (2014). PENGARUH PERILAKU KONSUMTIF TERHADAP GAYA HIDUP MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNTAN. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 3(2). <https://doi.org/10.26418/JPPK.V3I2.4610>
- Wu, C., & Shi, Z. (2020). Education and Social Trust in Transitional China. *Chinese Sociological Review*, 52(2), 115–143. <https://doi.org/10.1080/21620555.2019.1665995>